

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Bambang Waluyo. *Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Bawazir, Rifkho Achmad. "In Absentia Pada Persidangan Tindak Pidana Korupsi." *Hukumonline*. Hukumonline, 2026.
- Djoko Parkoso. *Peradilan In Absentia Di Indonesia Dan Koneksitas*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Esmi Warassih Dkk. *Ilmu Hukum Yang Kontemplatif Dalam Penelitian Hukum Interdisipliner*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Hertanto, Hasril. *Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2020.
- Hiariej, Eddy O S, Reda Manthovani, M Fatahillah Akbar, and Taufik Rachman. *Anotasi KUHAP: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2026.
- I Made Surnawan. *Pemeriksaan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarna Indonesia, 2022.
- Ilyas, Adam. *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*. Depok: Rajawali Pers, 2023.

Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris, Cetakan II*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.

M Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum Cetakan 1*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nurul Qamar and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Cetakan 1*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua), Cetakan Ke-1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum Cetakan 1*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Soejono H. Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Soekanto S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Sulaiman Saat dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020.

Supriadi. *Metode Penelitian Hukum Dan Teknik Penulisan Skripsi, Cetakan 1*. Jawa Barat: Ubhara Jaya Press, 2021.

B. Jurnal

Adtila Prawoko, Ab'dan Syukur, Neni Susilowati, Muhammad Ihsan Musyaffa, and Fitri Aulia Hannan Nisa⁵. "Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Wewenang Dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024).

Ariyanti Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2023).

- Arly Y. Mangoli. "Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Menurut KUHAP." *Lex Crimen* 10, no. 3 (2022).
- Dea Vony Nifili Zega, Mahmud Mulyadi, Detania Sukarja, and Wessy Trisna. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Persidangan Secara In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tersangka Yang Tidak Pernah Diperiksa Pada Tahap Penyidikan (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 59/Pid .Sus-TPK/2022/PN Mdn)." *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024).
- Dewi, Nida Amalia. "Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi." *Journal of Law* 1, no. 1 (2022).
- Elok Faikotul Hasana. "Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Media Akademik* 2, no. 12 (2024).
- Fauzin. "Peran Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *RechtIdee* 16, no. 1 (2023).
- Iffah Almitra. "Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement HIR." *Jurnal Verstek* 1, no. 3 (2022).
- Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al-Adl Jurnal Hukum* IX, no. 3 (2022).
- Jisman. "Praktek Kolusi Dan Nepotisme Dalam Birokrasi." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 2 (2022).
- Mutia Hafina Putri. "Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 7 (2023).
- Nurannisa Salsadila, Ayu Efritadewi, and Heni Widiyani. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia : Masalah Dan Solusinya." *Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2023).
- P. Iskandar Welang. "Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Corruptio* 1, no. 1 (2023).
- Rasyidi, Mudemar A. "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama." *Jurnal Universitas Surya Dharma* 1, no. 2 (2022).

- Rudy Kosasih Marlin Sembiring dan Halimah. "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023).
- Samsul Huda, Bambang Sugri, Nurini Aprilianda, and Heru Ratno Hadi. "Kriminalisasi Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 12 (2022).
- Samud. "Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2022).
- Saputra, Ewaprilyandi Fahmi, and Hery Firmansyah. "Politik Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime Dalam KUHP Nasional" 6, no. 2 (2023).
- Siagian, Putri Rumondang, Syafrudin Kalo, Edi Yunara, and Muhammad Hamdan. "Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Orang Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)." *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (2025).
- Steven Abednego, Mompang L. Panggabean, Jimmy Simanjuntak. "Penerapan Asas In Absentia Terhadap Kasus Korupsi." *Jurnal Hukum To-Ra* 8, no. 2 (2026).
- Subhan Sofhian. "Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia." *Jurnal Diklat Keagamaan* 14, no. 1 (2022).
- Triadi. "Mengenal Unsur Dan Jenis Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 3 (2024).
- Yenni Wiranti dan Ridwan Arifin. "Tantangan Dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Kosmik Hukum* 20, no. 1 (2025).
- Zul Akli. "Peradilan In Absentia Terhadap Terdakwa Yang Belum Diperiksa Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Reusam* VIII, no. Mei (2022).

C. Skripsi

- Ami Restu. "Tinjauan Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan In Absentia Tindak Pidana Korupsi," 2020. Repository Uin Ar Raniry.
- Jurais M. Saleh. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2025.

Rapar, Elieser Gerry. “Analisis Yuridis Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Yang Diperoleh Secara Tidak Sah Dalam Proses Penyidikan.” Universitas Hasanuddin, 2024.

Suprianus, Andres. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Melarikan Diri (DPO) Melalui Peradilan In Absentia.” Universitas Lampung, 2017.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20225 Nomor 188.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Menejemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negri Palembang, Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Putusan Pengadilan Negri Surabaya, Putusan Nomor 45/Pid Sus-TPK/2023/PN Sby

Putusan Pengadilan Negri Surabaya, Putusan Nomor 85/Pid Sus-TPK/2022/PN Sby

Putusan Pengadilan Negri Sidoarjo, Putusan Nomor 630/Pid.B.2010.PN.Sda

Putusan Pengadilan Negri Manokwari, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK.2020/PN Mnk

F. Petunjuk Teknis Kejaksaan

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-1742/F/Fd.1/08/2017 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Penyelesaian Perkara Yang Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).” Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2017.

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-845/F/Fjp/05/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas.” Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2018.

G. Internet

Daffa Dhiya. “Penangkapan Dalam Hukum Acara Pidana.” Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, 2022. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penangkapan-dalam-hukum-acara-pidana/>.

Deswita Abellia. “Mengenal In Absentia Dalam Perkara Pidana Dan Perdata.” Hukumku, 2025. <https://www.hukumku.id/post/in-absentia-dalam-perkara-pidana-dan-perdata#:~:text=Pengaturan mengenai in absentia dalam,hadir tanpa alasan yang sah.&text=Selain dalam perkara korupsi%2C pengaturan,meskipun terdakwa berusaha menghindari persidangan.>

Kamus Hukum Online Indonesia. “Analisis Yuridis,” n.d. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>.

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. “Daftar Orang Dalam Pencarian KPK,” 2025. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/daftar-pencarian-orang>.

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. “Data Penindakan Perkara Korupsi,” 2025. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.

Renata Christha Auli. “7 Jenis Tindak Pidana Korupsi Dan Contohnya.” Hukum Online.Com, 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/7-jenis-tindak-pidana-korupsi-dan-contohnya-lt5e6247a037c3a/#_ftn2.

Rifkho Achmad Bawazir. “In Absentia Pada Persidangan Tindak Pidana Korupsi.” Hukum Online.Com, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/in-absentia-pada-persidangan-tindak-pidana-korupsi-cl2684/>.